

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI JUMAT, 10 MEI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

KENAIKAN 'LIAR' UKT KAMPUS

Simalakama Status PTN BH, Biaya Dikerek 50-100%

Keriuhan terjadi buntut dari kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) terjadi di sejumlah kampus. Gelombang protes muncul di beberapa perguruan tinggi. Bahkan di Universitas Riau (Unri) kondisi sempat runyam karena Rektor Sri Indarti sempat mengajukan tuntutan kepada mahasiswanya yang mengkritik kebijakan kenaikan UKT. Meski akhirnya, laporan itu kini sudah di cabut. DPR RI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) segera turun tangan. Pasalnya selama ini tidak ada pengawasan sehingga UKT 'bergerak liar'. Meski perguruan tinggi negeri berstatus sebagai Badan Hukum (PTN-BH) dan Badan Layanan Umum (PTN-BLU) memiliki otoritas dalam menetapkan tarif, tetapi harusnya tetap ada standardisasi. Otoritas tersebut tidak boleh digunakan semena-mena untuk menaikkan biaya pendidikan.

Baca di hal 11....

UGM

UGM tetap mempertahankan skema lima kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa program sarjana dalam Keputusan Rektor Nomor 243/UN.1/P/KPT/HUKOR/2024, dengan peningkatan UKT pada tahun 2024 untuk sebagian besar program studi. Misalnya, UKT pendidikan unggul bersubsidi 75 persen untuk beberapa program studi seperti Bisnis Perjalanan Wisata dan Bahasa Inggris naik menjadi Rp3.000.000 per semester dari sebelumnya Rp2.850.000. Beberapa program studi lainnya yang mengalami kenaikan UKT antara lain Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat serta Sastra Arab di UGM.



Government (Hal.2)
Ingat! Masuk Makkah
2-20 Juni Tanpa
Izin Haji Difenda
Rp42,8 Juta

KENAIKAN BIAYA PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) TAHUN AKADEMIK 2024/2025

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 512 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal untuk Program Sarjana Tahun Akademik 2024/2025, besaran UKT terbagi dalam tujuh kelompok. UKT kelompok satu tetap Rp400.000 seperti tahun sebelumnya, sementara terjadi kenaikan pada UKT kelompok dua hingga tujuh. Misalnya, untuk program studi S1 Pendidikan Islam, UKT kelompok dua naik menjadi Rp2.640.000 dari Rp2.200.000 tahun sebelumnya, dan UKT kelompok tujuh meningkat menjadi Rp7.000.000 dari Rp4.400.000 pada tahun sebelumnya.

UI

UI telah melakukan perubahan pada sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2024 untuk mahasiswa S1 dan vokasi melalui berbagai jalur seleksi, mengadopsi lima kelompok dengan rentang UKT antara Rp500.000 hingga Rp20.000.000 per semester. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem sebelumnya yang mencakup sebelas kelompok dengan rentang UKT yang lebih luas. Dengan adanya perubahan ini, UI berupaya meningkatkan aksesibilitas dan transparansi biaya pendidikan bagi mahasiswa.

ITB

UKT per semester untuk program S1 reguler di ITB pada tahun 2024 mengalami peningkatan, namun skema biaya pendidikan masih menunggu persetujuan dari Kemdikbudristek. Usulan UKT untuk FMIPA dan Kampus Cirebon adalah Rp500.000 hingga Rp12.500.000, sedangkan untuk SITH, SF, SBM, dan fakultas lainnya adalah Rp500.000 hingga Rp14.500.000 per semester, berbeda dari tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp0 hingga Rp20.000.000 untuk SBM dan Rp0 hingga Rp12.500.000 untuk yang lainnya.

UNSOED

Berdasarkan Peraturan Rektor Unsoed Nomor 6 Tahun 2024, biaya pendidikan mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dibagi menjadi delapan kelompok UKT. Meskipun besaran UKT kelompok satu dan dua tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu masing-masing Rp500.000 dan Rp1.000.000, terjadi peningkatan signifikan pada UKT kelompok tiga hingga delapan. Contohnya, UKT untuk S1 Kedokteran mencapai Rp10.000.000 pada 2024 dari sebelumnya Rp7.100.000, sedangkan UKT kelompok tujuh meningkat menjadi Rp30.000.000 dari sebelumnya Rp17.500.000, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Ingat! Masuk Makkah 2-20 Juni Tanpa Izin Haji Didenda Rp42,8 Juta

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pengenaan denda bagi setiap orang yang melanggar peraturan dan instruksi haji selama periode 2020 Juni 2024. Termasuk soal aturan memasuki tempat suci seperti Makkah tanpa izin berhaji.

Dikutip dari Saudi Press Agency, sanksi berupa denda itu senilai SAR 10.000 atau setara dengan Rp 42,8 juta.

Sanksi denda itu akan dikenakan bagi setiap individu yang ditemukan tanpa izin haji di Makkah, kawasan tengah Arab Saudi (Najd atau Riyadh), situs-situs suci, Stasiun Kereta Api Al Harmain di Rusayfah, pusat kontrol keamanan, pusat penyortiran, dan pusat kontrol keamanan sementara.

"Kementerian telah mengonfirmasi bahwa denda SAR 10.000 akan dikenakan pada semua warga negara, penduduk, dan pengunjung yang tertangkap dalam wilayah geografis yang ditentukan namun tidak memiliki izin haji," dikutip dari keterangan resmi kerajaan Arab Saudi, Kamis (9/5/2024).

Selain itu, warga negara asing juga akan menghadapi deportasi ke negara asal mereka dan larangan memasuki Kerajaan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum bila melanggar ketentuan dan instruksi haji.

Menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan instruksi haji, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kembali menegaskan bahwa pelanggar akan menghadapi denda ganda SAR 10.000 untuk pelanggaran berulang.

Ketetapan ini menurut pemerintah Arab Saudi dalam rangka memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepastian para peziarah dalam melakukan ibadah haji.

Mengangkut individu yang melanggar peraturan dan instruksi haji tanpa izin juga merupakan pelanggaran serius. Ancaman hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda hingga SAR 50.000.

Sarana transportasi akan disita oleh putusan pengadilan, dan pengangkut ekspatriat akan menghadapi deportasi setelah penegakan hukuman.

Selain itu, akan ada larangan memasuki Kerajaan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Hukuman finansial meningkat secara proporsional dengan jumlah pelanggar yang diangkut.

Pihak berwenang mendesak masyarakat untuk melaporkan pelanggar dengan menelepon (911) di Makkah, Riyadh, dan Provinsi Timur, dan (999) di wilayah Kerajaan yang selain itu.



Seorang petugas melintas di samping miniatur Bukit Shafa dan Marwah Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). (CNBC)

Menag Bertemu Masyariq: Cegah Masalah Muzdalifah

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, bersama jajarannya menggelar pertemuan dengan Masyariq dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi. Pertemuan ini membahas penyiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia, khususnya saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Masyariq adalah perusahaan atau pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama dalam menyiapkan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo secara khusus menanyakan langkah antisipasi yang disiapkan Masyariq agar masalah Muzdalifah seperti pada musim haji tahun lalu tidak terulang.

Tragedi Muzdalifah pada 2023 membuat ribuan jemaah merana dan sengsara karena terpengang terik matahari berjam-jam-jam dari pagi hingga siang hari bahkan menyebabkan sejumlah jemaah meninggal.

Merespons itu, Ketua Masyariq, M Amin Indragiri, menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalisir kejadian tersebut.

Pertama, Amin menegaskan bahwa tahun ini Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat dalam rangka penertiban jemaah dengan visa tidak resmi. Salah satu terobosannya adalah dengan menerapkan smart card.

Kedua, pintu bus pengantar jemaah haji dari hotel menuju Arafah pada 8 Zulhijah akan disegel dengan stiker. Segel pintu tidak dibuka kecuali setelah jemaah tiba di Arafah dan dibuka oleh keamanan umum.

"Jika segel terbuka sebelum masuk Arafah. Pihak yang melanggar ketentuan ini akan terkena denda 10 ribu riyal dan dideportasi," ujar dia dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (9/5/2024).

Masyariq juga menyiapkan beton dan kawat setinggi dua meter sebagai pembatas jalan agar pejalan kaki tidak mengambil jalur bus Taraddudi. Pihaknya juga menyiapkan 200 petugas untuk berjaga di sepanjang jalan.

Di sisi lain, pihaknya juga sedang mengajukan permohonan agar ada penambahan city bus yang digunakan di Masyair. Bus jenis ini selain kapasitas lebih banyak, bisa 75 orang, akses keluar masuknya juga lebih mudah dan ramah lansia.

"Ada sejumlah maktab yang tidak turun dari bus saat di Muzdalifah. Mereka akan diberangkatkan dari Arafah sekitar jam 10 atau 11 malam menuju Muzdalifah, lalu langsung ke Mina," jelas dia

Sementara itu, Menag Yaqut menilai positif mitigasi yang sudah disiapkan Masyariq. Dia berharap konsep mitigasi itu bisa diterapkan dengan baik saat puncak haji di Armuzna 1445 H/2024 M, tidak hanya sebatas teori.

"Saya berharap dari konsep mitigasi yang disampaikan Masyariq, pelayanan haji akan jauh lebih baik dari tahun lalu," ujar Yaqut.

Tidak hanya itu, Menag Yaqut juga berharap Masyariq bisa menyiapkan rencana darurat dengan baik. Sehingga, jika ada hal di luar jangkauan terjadi, sudah disiapkan skenario kontingensi.

Diketahui, proses pemvisaan jemaah haji reguler 1445 H/2024 M asal Indonesia hampir tuntas.

Sebanyak 554 kloter pun sudah terbentuk. Adapun tahun ini, Indonesia mendapat 241.000 kuota, terdiri atas 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus. (wid,rls,ist,ant/dya)

ATURAN BARU DARI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI TERKAIT PELAKSANAAN HAJI 2024.

1. Vaksinasi dan Verifikasi Kesehatan di Aplikasi Sehaty

Jamaah perlu melakukan verifikasi status vaksinasi melalui aplikasi Sehaty. Jamaah wajib vaksin meningitis dan perlu melampirkan surat keterangan bebas dari penyakit menular.

2. Wajib Kantongi Izin

Otoritas Saudi memperketat aturan masuk Makkah, tak bisa sembarangan. Penduduk yang tidak memiliki izin yang sesuai, termasuk izin bekerja di tempat suci, tanda pengenalan penduduk Makkah, izin umrah yang sah atau izin haji yang sah akan ditolak masuk di pos keamanan menuju Makkah.

3. Wajib Pakai Visa Haji, Haji Tanpa Visa Resmi Tidak Sah

Aturan terpenting dalam pelaksanaan haji adalah wajib pakai visa resmi. Saudi menegaskan, haji tanpa visa resmi tidak sah. Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengatakan haji tanpa visa adalah ilegal.

4. Visa Haji Terbatas untuk Izin Masuk Jeddah, Madinah, dan Makkah

Visa haji berlaku untuk izin kunjungan dalam Kota Jeddah, Madinah, dan Makkah. Pihak berwenang menegaskan visa haji tidak berlaku untuk bekerja, tinggal, atau bepergian keluar wilayah tersebut.

5. Kartu Nusuk untuk Akses Layanan Haji

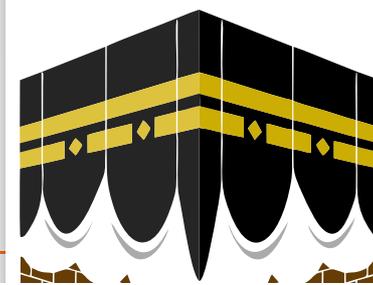
Kementerian Haji dan Umrah Saudi meluncurkan kartu Nusuk atau Smart Card untuk setiap jamaah.

6. Masa Berlaku Paspor Minimal sampai Akhir Zulhijah 1445 H

Paspor juga menjadi syarat umum yang wajib dipenuhi jamaah haji. Kementerian Haji dan Umrah Saudi menetapkan jemaah harus memiliki paspor yang masih berlaku, minimal hingga akhir bulan Zulhijah 1445 H atau 6 Juli 2024.

7. Pelanggar Aturan Haji Kena Denda dan Deportasi

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan pemberlakuan sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan haji. Pelanggar akan dikenai hukuman berupa denda hingga deportasi ke negara asal. Aturan ini efektif mulai 2 Juni 2024 hingga 20 Juni 2024.



Buntut Rp 12 M 'Tarif' WTP Kementan DPR: Evaluasi Menyeluruh BPK

JAKARTA-Fakta-fakta dalam persidangan dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus mencuat dan mengejutkan. Terbaru, Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Hermanto mengungkap kesaksian baru permintaan pemberian uang Rp 12 miliar dari auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk Kementan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

'Uang pelicin' itu diduga dimintakan BPK usai temuan kegagalan anggaran pada proyek food estate atau lumbung pangan nasional.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dievaluasi secara menyeluruh buntut adanya dugaan permintaan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk WTP Kementan.

"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Mekanisme Pemeriksaan oleh auditor ke entitas Objek Pemeriksaan. Mulai dari rekrutmen anggota BPK RI, Sistem Pendidikan Auditor, S.O.P Pemeriksaan entitas objek, Mekanisme pengawasan internal," kata Kamrussamad kepada wartawan, Kamis (9/5/2024).

Kamrussamad menegaskan semua pihak harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk menghentikan tindakan jual beli WTP, sehingga dapat mencegah terulangnya kasus hukum yang menimpa Kementerian/Lembaga atau entitas yang diperiksa oleh BPK RI.

"Harus ada komitmen sungguh-sungguh dari seluruh stakeholder untuk hentikan indikasi jual-beli WTP, agar tidak terulang terus menerus kasus hukum yang menjerat K/L atau entitas objek pemeriksaan oleh BPK RI," ujar dia.

Senada, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menganggap status WTP BPK menjadi ladang korupsi.

"Selama ini kementerian atau lembaga negara yang mendapat WTP dari BPK RI patut dicurigai dan tidak gratis," kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/5/2024)

Pernyataan Uchok ini mengonfirmasi adanya dugaan keterlibatan anggota BPK dalam menerbitkan WTP untuk Kementerian Pertanian di era Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"BPK harus membuka penyidikan baru karena adanya temuan baru yaitu disebutkan nama anggota baru BPK Haerul Saleh dan terbukanya kasus baru yaitu program food estate di kementan," tutur Uchok.



Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/3/2024).ant

KPK mengatakan pihaknya akan mengembangkan fakta yang terungkap dalam sidang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersebut. "Banyak fakta-fakta menarik saya kira dalam persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim jaksa," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengatakan tim jaksa KPK akan Menyusun laporan persidangan. Dalam laporan itu akan memuat fakta hukum terkait permintaan Rp 12 miliar dari BPK untuk kemudian dikembangkan dalam proses penyidikan.

"Secara teknis tim jaksa tentunya akan Menyusun laporan persidangan atau laporan penuntutan secara berjenjang. Laporan pengembangan penuntutan itu lah sebagai dasar pengembangan perkara yang fakta-faktanya muncul dalam proses persidangan," ujar Ali.

Ali menjelaskan penyidikan kasus pencucian uang dengan tersangka SYL saat ini juga masih berlangsung di KPK. Para saksi yang hadir dalam persidangan nantinya juga berpeluang untuk dipanggil kembali oleh KPK dalam proses penyidikan.

"Fakta-fakta yang kemudian terungkap dalam persidangan itu kan memang ada beberapa yang temuan-temuan baru dari keterangan saksi-saksi yang sudah terbuka dalam proses persidangan. Sedangkan untuk perkara SYL sendiri kan masih berjalan penyidikannya untuk TPPU itu kan masih berjalan. Jadi sangat mungkin kemudian tim penyidik juga memanggil nama-nama orang yang kemudian muncul dalam proses persidangan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan aliran uang," tutur Ali.

Awal Mula 'Uang Pelicin' Terungkap

Ada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut meminta uang yang nilainya mencapai Rp 12 miliar sebagai syarat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pertanian.

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan korupsi dengan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Dugaan permintaan ini terungkap saat tim Jaksa KPK mencecar Hermanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, yang dihadirkan sebagai saksi, terkait penilaian WTP di Kementan.

Jaksa mempertanyakan proses penilaian atau audit BPK karena belakangan ditemukan banyak temuan-temuan tak wajar. Termasuk dugaan wajib iuran bagi pegawai Kementan untuk memenuhi kebutuhan SYL.

"Yang di zaman saksi 2022, 2023, bagaimana proses pemeriksaan BPK itu sehingga menjadi WTP?" tanya jaksa.

"Saya enggak terlalu persis tahu," kata Hermanto.

"Kalau begitu kejadian, apa saksi pernah bertemu dengan Pak Victor Daniel Siahaan, Toranda Saifullah [auditor BPK - red]?" tanya jaksa lagi.

"Iya, betul," kata Hermanto.

"Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?" tanya jaksa.

"Pernah disampaikan konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan," ungkap Hermanto.

Jaksa lalu melanjutkan pertanyaan,

FAKTA-FAKTA BARU SIDANG SYL

SPJ Fiktif

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto, mengaku rekan-rekannya beberapa kali membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan fiktif untuk memenuhi beragang permintaan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menjabat menteri.

Sewa Private Jet

SYL membebaskan sewa privat jet kepada pejabat Kementan. Nilainya tidak sedikit, mencapai Rp 1 miliar. Privat jet itu dipakai untuk ke Aceh-Ujung Pandang-Cengkareng. Setidaknya ada dua kali penyewaan privat jet itu.

Bayar Kurban

SYL kurban 12 sapi senilai Rp 360 juta. Namun uangnya diduga dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ke Brasil dan AS Pakai Uang Iuran Anak Buah

Sejak awal SYL menjabat ada permintaan untuk memenuhi dana yang tidak diatur dalam anggaran. Urutan kemudian dilakukan oleh 5 direktori di Kementerian Pertanian. Salah satunya kunjungan Brasil, Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Bayar Umrah

Puguh Hari Prabowo selaku Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian (PSP) Kementan mengungkap pejabat Kementan diminta menyediakan sejumlah uang untuk membayar perjalanan spiritual umrah SYL.

Gaji Pembantu Rp 35 Juta

Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, mengaku pernah menggunakan uang pribadi untuk SYL. Diperuntukkan untuk membayar gaji pembantu SYL. Dia membeberkan nilainya Rp 35 juta. Tapi uang itu sudah diganti, karena merupakan uang pribadi.

Bayar WTP BPK

Ada permintaan uang Rp 12 miliar oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai syarat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pertanian.

apakah auditor BPK tersebut pernah menyampaikan permintaan uang agar Kementan mendapatkan predikat WTP.

"Terkait hal tersebut bagaimana, apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?" tanya jaksa.

"Ada, waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan," ungkap Hermanto.

"Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?" jaksa mempertegas.

"Iya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi," kata Hermanto. (wis,rla,ant/dya)

KPK Pastikan 4 Bulan Lagi Gus Muhdlor Sudah Disidang



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor (rompi oranye) di dalam mobil tahanan se usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2024). Ist

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membawa Bupati (nonaktif) Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali ke persidangan.

"Dalam waktu 4 bulan kami pastikan tim jaksa sudah melimpahkan ke penuntutan untuk dibawa pada persidangan," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (9/5/2024).

Sosok pria yang biasa disapa Gus Muhdlor ini sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW), Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS), serta Gus Muhdlor. KPK mengaku telah mengantongi bukti awal senilai Rp 2,7 miliar untuk menjerat Gus Muhdlor.

Ali Fikri menyampaikan, tim penyidik KPK tengah fokus merampungkan berkas perkara Gus Muhdlor. Penahanan terhadap yang bersangkutan dapat diperpanjang dalam rangka penyidikan hingga maksimal empat bulan.

"Selama maksimal 4 bulan ini terus kami kumpulkan dan kembangkan lebih jauh terkait dengan dugaan penerimaannya," ujar Ali Fikri.

Dalam kasus ini, Ari Suryono memerintahkan Siska Wati menghitung besaran dana insentif yang diterima pegawai BPPD berikut juga besaran potongannya. Hasil potongan tersebut diduga untuk kebutuhan Ari serta Gus Muhdlor.

Atas perbuatannya tersangka Ahmad Muhdlor Ali disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Soroti KPK soal Tersangka Mangkir

Terpisah, Pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara) Prof Solahudin mengatakan, proses penanganan kasus korupsi potongan dana insentif di lingkungan Pemkab Sidoarjo hingga Rp 2,7 miliar pada 2023 yang melibatkan Gus Muhdlor ini, jelas mempengaruhi kredibilitas KPK di mata publik.

"Seperti ini, dua kali dipanggil (mangkir) tidak segera dilakukan upaya paksa, sampai akhirnya datang sendiri. Itu biasa dalam penegakan hukum. Tetapi kalau dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap trust atau kepercayaan masyarakat. Dengan ditahannya, masyarakat mulai percaya lagi," ujar Prof Solahudin, Rabu (8/5/2024).

Ia menambahkan, proses penegakan hukum di mata para aktor penegak hukum seringkali mencair sesuai berbagai kepentingan. Apalagi, subjek hukum yang dikenakan adalah orang yang memiliki jabatan publik. Sehingga, akan ada berbagai faktor yang memengaruhi lurus atau tidaknya penegakan hukum itu.

"Penegakan hukum itu kalau menurut teori Charles Stanford dalam buku 'The Disorder Of Law' disebut adanya hukum itu mencair. Ketika ditegakkan hukum itu mencair. Makanya, tiap penegakan hukum,

tidak hanya ke kepala daerah, misalnya ke politikus, pasti penegakannya tersendat-sendat. Karena berbagai faktor kepentingan memengaruhi. Kita tunggu aja, karena yang bersangkutan juga melakukan praperadilan. Kita tunggu bagaimana nanti putusan dari praperadilan itu," tambahnya.

Terkait praperadilan ini, diketahui Gus Muhdlor tengah melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan teregister dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Permohonan ini didaftarkan pada Senin (22/4).

Namun, praperadilan itu semestinya tidak memengaruhi proses penanganan kasus korupsi oleh KPK terhadap Gus Muhdlor.

"Tetap saja proses penyidikan berjalan, karena praperadilan hanya mempersoalkan penetapan tersangka apakah sah atau tidak. Kalau berbicara soal ini, hanya memeriksa adakah dua alat bukti yang sah yang sudah dimiliki penyidik. Itu saja yang dipersoalkan dalam persidangannya. Tidak menyangkut pokok perkara," jelas Prof. Solahudin.

Perjalanan dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sidoarjo ini mendapatkan atensi besar dari publik. Mengingat, Gus Muhdlor menambah panjang daftar Bupati Sidoarjo yang menjadi tersangka korupsi setelah Win Hendarso dan Saiful Ilah yang tersandung suap dan gratifikasi.

"Perjalanan kasus ini akan memengaruhi kredibilitas dari KPK sendiri. Kalau tersendat akan membawa nama baik atau nama buruk dari KPK. Kita tunggu aja dan kita kawal," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo sempat mangkir dua kali panggilan KPK. Tepatnya pada Jumat, 19 April 2024 dan Jumat, 3 Mei 2024.

Akhirnya, pada Selasa, 7 Mei 2024 dirinya memenuhi panggilan KPK dan ditahan pada hari itu juga hingga 20 hari ke depan atau 26 Mei di Rutan KPK. Muhdlor ditampilkan dalam konferensi pers dengan mengenakan rompi warna oranye dan tangan diborgol pada Selasa (7/5/2024) sore. (wid,rla,ant/dya)

HARTA GUS MUHDLOR

TOTAL

RP 4,7 MILIAR

(LHKPN KPK 6 Maret 2023)



Tanah & bangunan

Rp 1,7 Miliar



Kendaraan senilai

Rp 183,5 Juta



Harta lainnya

Rp 8,1 miliar



Surat berharga senilai

Rp 900 Juta



Kas dan setara kas senilai

Rp 1,6 Miliar



UTANG

Rp 3,3 Miliar



Caleg Terpilih di Pileg 2024 Maju Pilkada **KPU: Tak Wajib Mundur**



JAKARTA - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan calon legislatif (Caleg) terpilih di Pileg 2024 tidak wajib mundur jika akan maju dalam Pilkada. Hasyim mengatakan hal itu lantaran caleg terpilih belum dilantik secara resmi sebagai anggota legislatif.

Namun perlu digarisbawahi, jika caleg terpilih tersebut merupakan anggota legislatif dari Pemilu 2019, maka wajib mundur dari jabatan yang didudukinya saat ini. Tapi, kata dia, anggota legislatif tersebut tidak wajib mundur dari statusnya sebagai caleg terpilih.

"Anggota DPR/DPD/ DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019 dan nyaleg Pemilu 2024 dan terpilih (calon terpilih), maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, dan tidak wajib mundur dari jabatan," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (8/5/2024).

"Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" sambung dia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024, kata Hasyim, pihak yang wajib mundur saat mencalonkan diri dalam Pilkada ialah pihak yang telah dilantik dan memiliki jabatan. Hasyim mengatakan jika pihak itu belum dilantik, maka tidak wajib mundur.

"Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD

terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah," bunyi putusan MK pada angka [3.13.1].

"Harap dibaca cermat frasa, 'jika telah dilantik secara resmi menjadi....' Sekali lagi, yang wajib mundur adalah anggota," jelas Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan tidak ada aturan mengenai pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD serentak. Dia menuturkan jika caleg terpilih itu gagal dalam Pilkada, maka dapat dilantik secara susulan.

"Tidak ada larangan dilantik belakangan (setelah kalah dalam pilkada)," tuturnya.

Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan

Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memastikan, KPU akan memverifikasi data dukungan bakal calon perseorangan atau independen yang sudah diserahkan. Menurut Idham, verifikasi yang dilakukan adalah administrasi dan faktual.

"Data dukungan bakal paslon perseorangan yang diserahkan pada 8-12 Mei 2024 tersebut nantinya akan diverifikasi administrasi dan faktual," kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Adapun, dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pilkada

2024 sudah bisa diserahkan ke KPU sejak Rabu (8/5/2024) dan berakhir pada Senin (12/5/2024).

Sementara itu, jadwal pendaftaran bakal pasangan calon baik dari jalur partai politik atau perseorangan adalah 27-29 Agustus 2024. Menurut Idham, verifikasi administrasi dilakukan untuk memastikan tidak ada kegandaan dukungan bagi pasangan calon perseorangan.

Sebab, kegandaan dukungan dapat terjadi apabila satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali terhadap pasangan calon yang sama atau satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rencana untuk mempercepat jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dari November ke September.

Hal itu disampaikan saat ditanya wartawan perihal surat presiden (surpres) revisi Undang-undang Pilkada yang saat ini dikabarkan sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Enggak ada, enggak ada. Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan pilkada," ujar Jokowi kepada wartawan usai meninjau Pasar Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagaimana dilansir keterangan resmi pada Rabu (8/5/2024).

Kepala Negara menegaskan bahwa pemungutan suara pada Pilkada 2024 tetap digelar November. (wid, ant,ist/dya)

JADWAL LENGKAP PILKADA 2024



**27 Februari -
16 November 2024:**
Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;



**24 April -
31 Mei 2024:**
Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;



**5 Mei -
19 Agustus 2024:**
pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan



24-26 Agustus 2024:
pengumuman pendaftaran pasangan calon



27-29 Agustus 2024:
pendaftaran pasangan calon



**27 Agustus -
21 September 2024:**
penelitian persyaratan calon



22 September 2024:
penetapan pasangan calon



**25 September -
23 November 2024:**
pelaksanaan kampanye



27 November 2024:
pelaksanaan pemungutan suara



**27 November -
16 Desember 2024:**
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan.



Rencana Relokasi Pasar Induk Gadang ke Terminal Hamid Rusdi Pedagang Minta Pemkot Malang Lebih Selektif

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana merelokasi pedagang dari Pasar Induk Gadang (PIG) ke Terminal Hamid Rusdi. Pedagang pun angkat suara dengan meminta agar Pemkot Malang lebih selektif serta membuat keputusan berdasarkan data akurat.

Juhari, seorang pedagang di Pasar Induk Gadang (PIG) merasa keberatan jika relokasi dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas. Menurutnya, tidak semua pedagang di pasar tersebut mengganggu arus lalu lintas, salah satu alasan utama di balik rencana relokasi ini. Oleh karena itu, Juhari berharap agar relokasi hanya difokuskan pada pedagang yang benar-benar menyebabkan kemacetan di sekitar pasar.

"Memang kemarin itu kami sempat mendengar kabar, sekitar 600 pedagang pasar ini mau direlokasi ke (terminal) Hamid Rusdi. Lah, apakah itu (600 pedagang) itu termasuk dengan pedagang yang ada di dalam (pasar) atau bagaimana, saya belum mengerti konsepnya," ujar Juhari, saat dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (9/5/2024).

Menurut Juhari, relokasi hanya perlu dilakukan pada pedagang yang memang berdampak langsung pada

kemacetan, yaitu para pedagang yang selama ini telah berjualan di pinggir jalan. Ia menekankan, pedagang di dalam area pasar biasanya tidak menimbulkan masalah lalu lintas.

"Kalau persoalan kemacetan, ya monggo yang menjadi alasan macetnya jalan itu yang direlokasi ke sana (terminal Hamid Rusdi)," imbuhnya.

Lebih lanjut, pedagang PIG yang mengaku telah berjualan sejak tahun 1980 an ini, juga menyoroti masalah alih fungsi lahan parkir yang menjadi lapak pedagang. Menurutnya, hal inilah yang membuat kendaraan parkir sembarangan di sebelah timur jembatan Pasar Gadang, sehingga kerap menyebabkan kemacetan.

"Nah tapi kalau pedagang yang di dalam pasar, itu kan aman-aman saja, artinya tidak menyebabkan kemacetan. Lah yang (pedagang di luar pasar) itu yang ilegal dan mengganggu kelancaran jalan," terang Juhari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa pedagang memang masih berjualan di luar batas pasar, melanggar peraturan yang ada. Dalam konteks ini, Juhari menyatakan setuju dengan relokasi asalkan dilakukan untuk pedagang ilegal dan yang selama ini mengganggu lalu lintas.



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, saat meninjau kondisi Terminal Hamid Rusdi yang bakal dijadikan lokasi merelokasi pedagang dari Pasar Induk Gadang (PIG). (Santi/Lenteratoday)

"Karena selain mengganggu jalan, juga mengganggu orang-orang yang patuh hukum yang selama ini berjualan di dalam pasar. Karena kalau di dalam pasar, kan ada (retribusi) ke pemerintah. Nah kalau di luar kan cuma beli perorangan," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Pemkot Malang telah menetapkan Terminal Hamid Rusdi sebagai lokasi sementara untuk rencana relokasi pedagang Pasar Induk Gadang. Pj Wali Kota

Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, keputusan ini diambil karena Terminal Hamid Rusdi dianggap tidak terlalu jauh dari pasar tersebut dan selama ini tidak banyak digunakan untuk jalur angkutan umum.

"Kami melihat langsung kondisi Pasar Induk Gadang, mulai dari pedagang yang tidak tertata, kemacetan, hingga tumpukan sampah. Ini masalah lama yang harus segera diselesaikan," ujar Wahyu. (Santi/Dya)

Realisasi PAD Tak Sesuai Target

DPRD Kabupaten Malang Bakal Evaluasi OPD Penghasil

MALANG - DPRD Kabupaten Malang bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2023 yang tidak mencapai target. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malang, Kholiq, mengatakan, hal tersebut diketahui usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

Menurut Kholiq, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hanya mencapai 81,80 persen dari target. Untuk itu, evaluasi terhadap OPD penghasil diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab di balik rendahnya realisasi dan merumuskan solusi untuk tahun anggaran berikutnya.

"Ya, nanti pasti kita bahas dulu di panitia khusus (pansus). Nanti teman-teman pansus akan meneliti satu per satu. Kalau sekilas dari penyampaian Bupati tadi, kami kan belum mempelajari betul. Nanti akan ketahuan pada tanggal 15 Mei mendatang," ujar Kholiq, ditemui usai memimpin rapat paripurna tersebut, Rabu (8/5/2024).



Bupati Malang, Sanusi, bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malang, Kholiq, usai Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Rabu (8/5/2024). (Santi/Lenteratoday)

Diketahui, pada Tahun Anggaran (TA) 2023, PAD Kabupaten Malang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun 25 miliar 586 juta, namun realisasinya baru mencapai Rp 838 miliar 906 juta. Di mana pendapatan retribusi menjadi salah satu komponen PAD yang paling jauh dari target, yakni baru mencapai 28,94 persen dari target sebesar Rp 119 Miliar 529 Juta.

"Termasuk juga pendapatan retribusi yang masih terealisasi 28 persen, nanti akan kami evaluasi

bersama dengan pansus. Nah yang belum tercapai itu nanti kita sampaikan pada pandangan fraksi," tambah Kholiq.

Untuk memahami penyebab rendahnya realisasi PAD, Kholiq menyebut DPRD Kabupaten Malang akan memanggil OPD terkait. Kholiq mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi OPD sehingga realisasi PAD tidak sesuai target. "Ya OPD nya nanti akan kami

panggil, kira kira kesulitan apa sehingga menyebabkan banyak hal yang belum tercapai. Apalagi PAD kan baru 81 persen," terangnya.

Lebih lanjut, selain menyoroti target PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 juga menjadi perhatian dewan. Dengan jumlah mencapai Rp 275 Miliar 450 Juta, naik dari SiLPA 2022 yang sebesar Rp 235 Miliar. Kholiq menyatakan, peningkatan SiLPA ini akan dianalisis untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, Bupati Malang, Sanusi menambahkan, meskipun realisasi PAD masih rendah, namun menurutnya, terdapat komponen pendapatan lain yang menunjukkan hasil positif.

Sanusi menyebutkan, Pendapatan transfer untuk Tahun Anggaran 2023 bahkan melampaui target, mencapai Rp 3 Triliun 239 Miliar 566 Juta, atau 101,91 persen dari target. Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga hampir mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp 296 Miliar 752 Juta atau 99,78 persen. (Santi/Dya)

PHOEBE DYNEVOR

Memakai Gaun Karya Victoria Beckham

BINTANG serial Netflix "Bridgerton" Phoebe Dynevor tampil di Met Gala 2024 mengenakan gaun custom Victoria Beckham yang ditata oleh Nicky Yates.

Menurut Kholiq, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hanya mencapai 81,80 persen dari target. Untuk itu, evaluasi terhadap OPD penghasil diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab di balik rendahnya realisasi dan merumuskan solusi untuk tahun anggaran berikutnya.

"Ya, nanti pasti kita bahas dulu di panitia khusus (pansus). Nanti teman-teman pansus akan meneliti satu per satu. Kalau sekilas dari penyampaian Bupati tadi, kami kan belum mempelajari betul. Nanti akan ketahuan pada tanggal 15 Mei mendatang," ujar Kholiq, ditemui usai memimpin rapat paripurna tersebut, Rabu (8/5/2024).

Diketahui, pada Tahun Anggaran (TA) 2023, PAD Kabupaten Malang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun 25 miliar 586 juta, namun realisasinya baru mencapai Rp 838 miliar 906 juta. Di mana pendapatan retribusi menjadi salah satu komponen PAD yang paling jauh dari target, yakni baru mencapai 28,94 persen dari target sebesar Rp 119 Miliar 529 juta.

"Termasuk juga pendapatan retribusi yang masih terealisasi 28 persen, nanti akan kami evaluasi bersama dengan pansus. Nah yang belum tercapai itu nanti kita sampaikan pada pandangan fraksi," tambah Kholiq.

Untuk memahami penyebab rendahnya realisasi PAD, Kholiq menyebut DPRD Kabupaten Malang akan memanggil OPD terkait. Kholiq mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi OPD sehingga realisasi PAD tidak sesuai target. "Ya OPD nya nanti akan kami panggil, kira kira kesulitan apa sehingga menyebabkan banyak hal yang belum tercapai. Apalagi PAD kan baru 81 persen," terangnya.

Lebih lanjut, selain menyoroti target PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 juga menjadi perhatian dewan. Dengan jumlah mencapai Rp 275 Miliar 450 Juta, naik dari SiLPA 2022 yang sebesar Rp 235 Miliar. Kholiq menyatakan, peningkatan SiLPA ini akan dianalisis untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, Bupati Malang, Sanusi menambahkan, meskipun realisasi PAD masih rendah, namun menurutnya, terdapat komponen pendapatan lain yang menunjukkan hasil positif.

Sanusi menyebutkan, Pendapatan transfer untuk Tahun Anggaran 2023 bahkan melampaui target, mencapai Rp 3 Triliun 239 Miliar 566 Juta, atau 101,91 persen dari target. Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga hampir mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp 296 Miliar 752 Juta atau 99,78 persen. (Santi/Dya)

PROFIL DIRI

Tempat Tanggal Lahir:
Trafford, Greater Manchester,
Inggris, 17 April 1995

Kewarganegaraan:
Inggris

Pendidikan:
Oakfield Nursery School;
Cheadle Hulme School;

Profesi:
Aktris

Instagram:
@phoebedynevor





MINYAK ZAITUN KURANGI RISIKO KEMATIAN AKIBAT DEMENSIA

DIET Mediterania yang melibatkan penggunaan biji-bijian utuh, kacang-kacangan, sayuran, ikan, produk susu, dan minyak zaitun telah diketahui dapat mengurangi risiko demensia.

Dikutip dari Medical Daily, sebuah studi baru menyarankan bahwa minyak zaitun, salah satu komponen utama dari diet tersebut, bisa menjadi rahasia di balik manfaat tersebut.

Demensia adalah gangguan kognitif yang memengaruhi ingatan, pemikiran, dan kemampuan pengambilan keputusan individu.

Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi kehidupan 14 juta orang pada tahun 2060, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal JAMA Network Open, konsumsi harian setidaknya 7 g minyak zaitun terkait dengan risiko kematian yang lebih rendah akibat penyakit terkait demensia.

Temuan ini ditemukan setelah mengevaluasi database lebih dari 60 ribu wanita dalam Studi Kesehatan Perawat dan lebih dari 31 ribu pria dalam Studi Tindak Lanjut Profesional Kesehatan yang diikuti selama sekitar 30 tahun.

Para peneliti mengkaji pola makan peserta, termasuk jumlah konsumsi harian minyak zaitun.

Setelah menganalisis penyebab kematian peserta, 4.751 kematian terkait dengan demensia ditemukan.

Selama masa tindak lanjut, peserta yang mengonsumsi setidaknya setengah sendok teh minyak zaitun

setiap hari memiliki risiko kematian yang 28 persen lebih rendah akibat penyakit terkait demensia.

"Dalam 2 kohort prospektif besar AS dari pria dan wanita, kami menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi lebih dari 7 g/hari minyak zaitun memiliki risiko 28 persen lebih rendah untuk meninggal akibat demensia dibandingkan dengan peserta yang jarang atau tidak pernah mengonsumsi minyak zaitun," tulis para peneliti.

Temuan ini memberikan bukti untuk mendukung rekomendasi diet yang menganjurkan penggunaan minyak zaitun dan minyak nabati lainnya sebagai strategi potensial untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan dan mencegah demensia, lanjut para peneliti.

Studi mencatat bahwa mereka yang mengonsumsi minyak zaitun setiap hari, menggunakan lebih sedikit mentega, mayones, dan minyak nabati lainnya, yang diyakini memberikan manfaat terkait demensia bagi mereka.

Bagi mereka yang mengikuti diet Mediterania, minyak zaitun dalam diet mengurangi peradangan terkait faktor lain, yang membantu mereka mengurangi risiko demensia.

"Pada orang dewasa AS, konsumsi minyak zaitun yang lebih tinggi terkait dengan risiko kematian terkait demensia yang lebih rendah, terlepas dari kualitas diet.

Di luar kesehatan jantung, temuan ini memperluas rekomendasi diet saat ini untuk memilih minyak zaitun dan minyak nabati lainnya untuk

kesehatan terkait kognitif," tulis para peneliti.

Tubuh langsing

Ahli diet di Klinik Cleveland Kristin Kirkpatrick mengatakan kepada MedicalNewsToday bahwa pola makan mediterania banyak berkontribusi pada meningkatnya asam lemak omega-3, polifenol, mineral spesifik, serat, dan protein yang dapat mendukung kesehatan dan perlindungan otak selama bertahun-tahun.

"Tapi yang harus diingat, adalah jumlah panganan yang dikonsumsi. Makanlah dengan porsi yang masuk akal dan tidak berlebihan atau terlalu sedikit, bila Anda ingin pola makan ini menunjukkan manfaat pada tubuh," kata Kirkpatrick.

Mengingat pola makan ini tinggi akan kandungan asam lemak omega 3 yang memberikan banyak perlindungan otak, hal ini kemudian membuat sejumlah ilmuwan meneliti manfaat lain di balik diet mediterania.

Terbukti, beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa pola makan mediterania dapat membantu mengurangi risiko demensia dan penurunan kognitif, selain bermanfaat bagi kesehatan jantung dan membantu menurunkan berat badan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pola makan mediterania dapat membantu mencegah penumpukan dua protein dan penyusutan volume otak yang berhubungan dengan penyakit alzheimer termasuk demensia.

"Dalam studi penting ini, para peneliti menunjukkan bahwa pola makan mediterania tidak hanya meningkatkan fungsi kognitif, terutama memori, tetapi juga mengurangi risiko patologi penyakit alzheimer termasuk demensia," kata dokter spesialis neurologi Richard Isaacson seperti dikutip laman CNNHealth. Isaacson merupakan salah satu pimpinan di Klinik Pencegahan Alzheimer di Weill Cornell Medicine dan Rumah Sakit NewYork-Presbyterian (Antara)



APPLE LUNCURKAN IPAD PRO DENGAN CHIP M4 TERBARU

APPLE meluncurkan iPad Pro terbaru, hadir dengan desain yang tipis dan ringan, layar canggih Ultra Retina XDR, serta telah disematkan chip M4 terbaru yang diklaim sangat cepat dengan kemampuan kecerdasan buatan (AI) yang kuat.

Dikutip dari laman Apple, iPad Pro baru tersedia dalam warna silver dan space black dengan kandungan aluminium daur ulang 100 persen serta hadir dalam dua ukuran yaitu model 13 inci yang luas dan model 11 inci super portabel.

iPad Pro menampilkan desain yang sangat tipis dan ringan. Model 11 inci memiliki ketebalan 5.3 mm dan berat kurang dari satu pon, sedangkan model 13 inci memiliki ketebalan 5.1 mm serta berat hampir seperempat pon lebih ringan dari pendahulunya.

iPad Pro baru menghadirkan layar Ultra Retina XDR, yang diklaim sebagai layar tercanggih di dunia. Layar Ultra Retina XDR menggunakan teknologi OLED tandem mutakhir yang menggunakan dua panel OLED dan menggabungkan cahaya dari keduanya untuk memberikan kecerahan layar penuh.

Layar ini mendukung kecerahan layar penuh 1.000 nits untuk konten SDR dan HDR, dan 1.600 nits untuk HDR. Pilihan kaca nano-texture baru hadir untuk pertama kalinya di iPad Pro, menjaga kualitas gambar dan kontras sambil menyebarkan cahaya ambien untuk mengurangi silau.

iPad Pro terbaru didukung chip M4 yang membawa peningkatan besar dalam kinerja. M4 menggunakan teknologi 3-nanometer generasi kedua yang

diklaim lebih efisien dalam penggunaan daya.

Dengan CPU baru dan GPU yang ditingkatkan, M4 memberikan kinerja hingga 1,5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Fitur-fitur seperti Dynamic Caching dan ray tracing membuatnya lebih cepat dalam pengolahan gambar.

M4 juga diklaim lebih efisien dalam penggunaan daya, memberikan

kinerja yang sama dengan hanya menggunakan setengah daya dibandingkan M2.

iPad Pro baru dengan M4 juga dilengkapi dengan Neural Engine Apple yang paling kuat yang pernah ada, mampu melakukan 38 triliun operasi per detik, yang 60x lebih cepat dibandingkan dengan Neural Engine pertama Apple dalam chip A11 Bionic.

Dengan iPad Pro dengan M4,

pengguna dapat melakukan tugas yang didukung AI dengan lebih cepat.

iPad Pro terbaru hadir dengan kamera belakang 12MP dan dilengkapi flash True Tone adaptif baru yang menjadikan pemindaian dokumen di iPad Pro diklaim baru lebih baik dari sebelumnya.

Di bagian depan, terdapat kamera Ultra Wide 12MP dengan Center Stage.

iPad Pro memiliki konektor USB-C berperforma tinggi yang mendukung Thunderbolt 3 dan USB 4, memberikan konektivitas kabel cepat hingga 40Gb/s.

Perangkat ini juga mendukung Wi-Fi 6E, jaringan 5G, dan eSIM. Perangkat baru ini kompatibel dengan aksesoris seperti Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard yang serba baru.

Pelanggan dapat memesan iPad Pro baru sejak 7 Mei di apple.com/store, dan di aplikasi Apple Store di 29 negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat, dengan ketersediaan di toko mulai 15 Mei.

iPad Pro 11 inci dan 13 inci baru akan tersedia dalam konfigurasi 256 GB, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB. iPad Pro 11 inci dijual di AS mulai dari 999 dolar AS (Rp16 juta) untuk model Wi-Fi, dan 1.199 dolar AS (Rp19,2 juta) untuk model Wi-Fi + Seluler.

Sedangkan iPad Pro 13 inci dibanderol mulai dari 1.299 dolar AS (Rp 20,8 juta) untuk model Wi-Fi, dan 1.499 dolar AS (Rp24 juta) untuk model Wi-Fi + Seluler (Antara)



KOTA ES HARBIN

Kian Populer di Mata Wisatawan

HARBIN, yang dikenal sebagai Kota Es di Provinsi Heilongjiang, China timur laut, melaporkan peningkatan jumlah wisatawan sebesar 35 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan peningkatan pendapatan pariwisata sebesar 71,7 persen selama liburan Hari Buruh, menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dan vitalitas pembangunan pasar pariwisata kota itu.

Selama liburan Hari Buruh yang berlangsung lima hari, Harbin menyambut lebih dari 6,2 juta wisatawan, menghasilkan pendapatan pariwisata hampir 7,3 miliar yuan (1 yuan = Rp2.251), menurut departemen pariwisata kota tersebut.

Data yang dirilis oleh Ctrip, sebuah platform perjalanan terkemuka di China, menunjukkan peningkatan sebesar 85 persen (yoy) dalam pesanan pariwisata masuk (inbound) ke Harbin sebagai salah satu destinasi wisata.

Harbin mengalami ledakan pariwisata sejak mendapatkan popularitas di platform media sosial pada musim dingin lalu.

Sumber daya es dan salju yang melimpah di kota itu, layanan atentif bagi wisatawan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung telah mengubahnya menjadi destinasi liburan yang ramai.

Saat liburan Tahun Baru selama tiga hari, Harbin menerima hampir 3,05 juta pengunjung, meraup pendapatan

pariwisata sebesar 5,91 miliar yuan.

Baik jumlah wisatawan maupun jumlah pendapatan pariwisata melampaui angka yang tercatat pada 2019, menandai puncak sejarah.

Meski es dan salju mencair serta sudah ditutupnya taman hiburan terkenal Dunia Es-Salju Harbin (Harbin Ice-Snow World), antusiasme terhadap pariwisata di Kota Es itu tetap tidak berkurang.

Untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan layanan secara keseluruhan, Harbin telah meluncurkan serangkaian kegiatan, menginovasi lokasi wisata bagi konsumen, dan meningkatkan pengalaman konsumen selama liburan.

Pada hari pertama liburan Hari Buruh, taman hiburan balon kastel raksasa dibuka untuk umum di lokasi penyelenggaraan Dunia Es-Salju (Ice-Snow World).

Balon Manusia salju baru setinggi 18 meter menggantikan manusia salju orisinal, menarik orang tua dan anak-anak untuk menjajal taman hiburan baru tersebut.

"Ledakan pariwisata di Harbin tidak boleh terbatas hanya pada musim dingin saja, melainkan harus berkembang sepanjang tahun," ujar Direktur Biro Kebudayaan dan Pariwisata Harbin Wang Hongxin.

Bus dan kapal pesiar
t e m a t i k
m e n a w a r k a n
k e s e m p a t a n

untuk menikmati sejumlah kawasan di kota itu, pertunjukan cahaya malam hari, pertunjukan drone, dan pemandangan Sungai Songhua.

Kota tersebut juga menjadi tuan rumah pertunjukan drama, simfoni, balet dan berbagai pertunjukan lainnya bagi wisatawan dari seluruh dunia.

"Saya tidak menyangka akan melihat kerumunan orang sebanyak itu di semua objek wisata utama. Saya keluar bersama teman-teman dan merasakan suasana ramai selama liburan, yang membuat saya sangat senang," ungkap Cang Xin, warga setempat.

Untuk lebih meningkatkan pariwisata musim panas, Harbin akan menyelenggarakan lebih banyak kegiatan yang menyajikan berbagai festival musik, bir, dan pertunjukan.

Departemen Pariwisata Harbin mengungkapkan bahwa kota tersebut meraup 16,42 miliar yuan (1 yuan = Rp2.176) dari pendapatan pariwisata selama liburan delapan hari itu, yang berlangsung pada 10-17 Februari 2024.

Ke depannya, Harbin akan terus mengintegrasikan berbagai sumber daya seperti atraksi wisata, kegiatan wisata budaya skala besar, merek khas daerah, dan situs budaya, serta merancang rute dan produk wisata guna membantu meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dalam menikmati sejarah dan pesona kota itu (Antara)



Kenaikan 'Liar' UKT ... (dari Hal 1)

KENAIKAN Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi tengah jadi sorotan publik lantaran menaui banyak protes. Dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ikut menyoroti persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengkritik keras kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN).

Dia menyindir kenaikan signifikan 50-100 persen mestinya tak boleh terjadi secara mendadak. Kata Dede, kenaikan itu harusnya dilakukan bertahap.

Menurut dia, kenaikan secara bertahap itu seperti 10 persen setiap tahun yang masih dinilainya wajar.

"Namun, jika lonjakan terlalu besar, kita harus bertanya, inflasi apa yang menyebabkan harga pendidikan menjadi naik? Apakah mengikuti harga cabai atau harga telur?" kata Dede Yusuf di Jakarta dikutip pada Kamis, 9 Mei 2024.

Dede curiga persoalan ini karena dipicu dugaan pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN. Namun, dugaan yang kemungkinan jadi pemicu tersebut mesti ditelusuri.

"Jangan-jangan pemerintah sudah tidak lagi mensubsidi beberapa perguruan tinggi negeri. Seberapa jauh ini kan akhirnya kaitannya kita juga perlu telusuri, komponen-komponen apa yang menyebabkan angka pembiayaan pendidikan menjadi tinggi," jelas politikus Demokrat itu.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung implementasi dari status PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Menurut dia, konsep PTNBH seharusnya bantu universitas cari pendanaan di luar dari student body. Lalu, di luar subsidi pemerintah yang ternyata belum berjalan dengan sempurna.

"Kalau hanya sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dengan pembiayaan dari mahasiswa itu sendiri, namanya bukan intisari dari peningkatan perguruan tinggi berbadan hukum. Sudah aja menjadi swasta sekalian," jelas Dede.

Maka itu, dia menuturkan, Komisi X DPR RI juga sudah bentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTNBH.

Terpisah, pengamat pendidikan Doni Koesoema heran dengan realita yang berkembang saat ini. Dia mengkritik keras lantaran status PTN BH malah seperti membuat masyarakat kesulitan mengakses perguruan tinggi negeri.

"Justru membuat pendidikan tinggi kita jadi mahal karena proses otonomi kampus tidak disertai dengan transisi bagaimana dukungan dari pemerintah," kata Doni saat dihubungi wartawan.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), PTN mesti harus berbadan hukum dengan harapan adanya otonomi untuk pengembangan kampus.

"Masalahnya, apakah dengan

adanya PTN BH kampus memiliki otonomi? PTN BH yang seharusnya otonom bagi kampus untuk pengembangan radikal, melalui UU itu, praktiknya dilepas begitu saja," jelas Doni.

Menurut dia, saat ini dampak proses otonomi kampus seperti pengelolaan biaya kepegawaian, dosen, pemenuhan kelengkapan edukasi dibebankan kepada peserta perkuliahan. Begitu juga dengan persoalan yang sangat kompleks malah dibebankan kepada peserta perkuliahan.

Menurut dia, saat ini dampak proses otonomi kampus seperti pengelolaan biaya kepegawaian, dosen, pemenuhan kelengkapan edukasi dibebankan kepada peserta perkuliahan. Begitu juga dengan persoalan yang sangat kompleks malah dibebankan kepada peserta perkuliahan.

"Ini regulasi tidak masuk akal, perhitungannya kan pemerintah menyusun proses transisi bertahap, masa menuju standar otonomi itu justru yang dibebankan kepada mahasiswa?" tutur Doni.

Kemudian, dia juga menyoroti kewajiban bagi PTN BH untuk menyetorkan dana ke pemerintah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"PNBP itu dilaporkan ke negara, masuk kas negara, terus dikucurkan lagi ke kampus-kampus. Kan ngucurnya bukan main susahnyanya. Kenapa sampai rektor PTN mikirin PNBP?" ujarnya.

Pun, dia juga mengingatkan agar perguruan tinggi swasta (PTS) tak usah buru-buru tergoda mengalihkan status badan hukumnya. Dia mengatakan demikian karena fenomena saat ini PTN BH justru lebih mahal dari PTS. Padahal, logikanya PTN mestinya lebih murah dari PTS.

"Niatnya kan ingin meratakan akses Pendidikan, PTN kan harusnya lebih murah. Namun mereka (PTS) harus berpikir emang mereka mau dikasih dana dari pemerintah kalau berubah jadi PTN BH?," lanjut Doni.

Kemdikbudristek Sebut Masih Terjangkau

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Abdul Haris menyatakan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih relatif terjangkau ketimbang Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Hal ini ia sampaikan merespons maraknya gelombang protes mahasiswa atas kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makariem sejak 2019.

"Di tengah isu kenaikan UKT, PTN masih relatif lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan PTS, karena PTN mengimplementasikan kewajiban menyelenggarakan kelompok tarif UKT 1 dan tarif UKT 2, tidak melampaui batas Biaya Kuliah Tunggal (BKT)," katanya.

Selain itu, Haris menjelaskan PTN masih memperoleh subsidi rutin dari

pemerintah, dan menawarkan lebih banyak beasiswa bagi para mahasiswanya.

Meski begitu, ia menegaskan penentuan besaran UKT harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Baginya, asas berkeadilan harus diterapkan dengan menemukan titik keseimbangan antara kemauan untuk membayar dan kemampuan untuk membayar.

"Untuk itu penetapan UKT mahasiswa harus bijaksana dan hati-hati," kata Haris.

Haris lantas menjelaskan penetapan UKT adalah wewenang pemimpin perguruan tinggi sehingga UKT hanya berlaku di universitas masing-masing.

Ia mengatakan UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN dan PTNBH. Dalam proses penetapan UKT tersebut, perguruan tinggi berstatus PTNBH harus melakukan konsultasi dengan Kemendikbud. Sementara perguruan tinggi di luar PTNBH harus memperoleh persetujuan dari Kemendikbud.

Namun, ia menjelaskan Kemendikbud selama ini telah memberikan rambu-rambu terkait UKT. Di antaranya kampus memiliki kewajiban untuk menyediakan Kelompok tarif UKT 1 sebesar Rp500 ribu per semester dan tarif UKT 2 sebesar Rp1 juta per semester. Selebihnya merupakan kebijakan masing-masing PTN dan PTNBH.

"Untuk selanjutnya pemimpin PTN dan PTNBH dapat menetapkan tarif UKT lainnya dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap program studi tersebut. Jadi BKT menjadi batas atas UKT," kata dia.

Haris pun membantah UKT mengalami kenaikan, melainkan hanya penambahan kelompok tarif dan rekonfigurasi kelas UKT.

"Itu pun sudah dibatasi paling maksimal sesuai dengan besaran BKT. Tentu ini untuk menerapkan asas berkeadilan dengan mengakomodasi masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang sangat baik dengan kemampuan membayar (ability to pay) yang lebih tinggi, supaya lebih proporsional," lanjutnya.

Haris menegaskan Kemendikbud tetap mendengar seluruh keluhan dan masukan dari masyarakat terkait UKT. Ia pun berjanji akan serius mengawasi penetapan UKT di seluruh perguruan tinggi agar sejalan dengan peraturan dan mengedepankan asas berkeadilan.

"Kami yakin bahwa semua PTN dan PTNBH akan memberikan ruang kesempatan dan bantuan bagi mahasiswa yang mempunyai kendala finansial," kata dia.

Belakangan ini mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Negeri Riau (Unri) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan melakukan protes terhadap kenaikan UKT.

Para mahasiswa Unsoed memprotes lantaran ada kenaikan uang kuliah hingga lima kali lipat.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed juga melayangkan protes terhadap rektorat atas kebijakan itu. Mereka tidak terima uang kuliah dinaikkan drastis dan tanpa informasi memadai.

Merespons aksi protes itu, rektorat Unsoed akhirnya mencabut kebijakan kenaikan UKT. Keputusan diambil setelah rektorat menggelar rapat pimpinan di akhir pekan sebelumnya.

"Kita hari ini memang memenuhi keinginan mahasiswa bahwa Peraturan Rektor Nomor 6 minta dicabut. Kita sudah melakukan itu," kata Wakil Rektor Bidang Akademik Unsoed Noor Farid.

Kasus lainnya terjadi di Universitas Negeri Riau (Unri) ketika seorang mahasiswa bernama Khariq Anhar memprotes ketentuan luran Pembangunan Institusi (PI) dalam UKT yang harus dibayar mahasiswa Unri.

Dia berdemostrasi dengan meletakkan jas almamater di depan kampus seperti berjualan, 4 Maret 2024. Khariq juga merekam aksi itu dalam bentuk video.

"(Video) berisi kampanye isu berupa satir lewat almamater yang dijual," kata Khariq Selasa (7/5/2024).

Dua pekan setelah aksi unjuk rasa, Khariq menerima kabar telah dilaporkan ke kepolisian. Ia dilaporkan oleh Rektor Unri Sri Indarti atas dugaan pelanggaran UU ITE. Dia tidak menyangka akan ada pelaporan semacam itu.

Terbaru, Rektor Universitas Riau (UNRI), Sri Indarti, mencabut laporan polisi terhadap mahasiswanya, Khariq Anhar. Sebelumnya, ia melaporkan Khariq ke Ditreskrimsus Polda Riau.

Laporan itu terkait pencemaran nama baik. Sri dikritik Kharik soal kenaikan luran Pengembangan Institusi (PI), dengan disebut "Broker Pendidikan Universitas Riau".

"Pencabutan laporan dilakukan setelah diketahui bahwa pemilik akun media sosial yang digunakan untuk mengkritik adalah mahasiswa UNRI," kata Sri dalam melalui video yang disiarkan UNRI, Kamis (9/5/2024).

"Selain itu melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan," lanjut Sri.

Sedangkan terkait pembiayaan pendidikan di Unri, ia meyakini pihaknya mengedepankan prinsip keadilan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sementara itu ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) Medan memprotes kenaikan UKT 2024 yang lebih dari 100 persen. Mereka mendesak Rektor USU Muryanto Amin mundur dari jabatannya karena dinilai membuat kebijakan yang semena-mena.

"Turunkan Rektor USU, turunkan Rektor USU," ucap para mahasiswa USU yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung Biro Rektor USU di Medan, Rabu (8/5/2024). (wid,rls,ant,ist/dya)

AS MURKA!

Israel Ngotot Serang Rafah, Komandan Angkatan Laut Hamas Tewas

WASHINGTON- Amerika Serikat (AS) murka akibat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan perluasan invasi di Gaza ke wilayah Rafah. Presiden Joe Biden mengancam menghentikan pengiriman senjata.

Rafah merupakan wilayah paling selatan di Gaza yang terletak dekat dengan perbatasan Mesir. Rafah kini telah turut diserang oleh Israel meskipun penghentian pasokan senjata telah disampaikan oleh Biden.

"Saya telah menyatakan secara jelas bahwa jika mereka pergi ke Rafah, saya tidak akan lagi memasok senjata yang digunakan untuk menyerang," kata Biden dilansir, Kamis (9/5/2024).

Biden jengkel kepada Netanyahu yang ia sebut terus menggunakan bom atau senjata yang selama ini dikirim AS untuk menyerang masyarakat sipil. Berbagai senjata dan bom itu menurutnya telah terus digunakan ke pusat-pusat penduduk.

"Warga sipil telah tewas di Gaza sebagai konsekuensi dari bom-bom itu dan cara-cara lain yang mereka lakukan di pusat-pusat populasi," tegas Biden.

Pernyataan Biden ini sekaligus menjadi bentuk pengakuannya bahwa Amerika Serikat selama ini memasok senjata ke Israel yang digunakan untuk menyerang masyarakat Gaza. Termasuk senjata dalam serangan tujuh bulan terakhir oleh Israel ke wilayah Gaza sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Namun, Biden menekankan, penghentian pasokan senjata ini tidak dalam arti AS meninggalkan



Suar ditembakkan di atas Rafah di Jalur Gaza selatan pada 7 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung di wilayah Palestina antara Israel dan kelompok militan Hamas.(AFP)

keamanannya. Melainkan untuk meminta Israel menghentikan invasi ke Rafah, kota lebih dari satu juta warga sipil Palestina berlindung dari bom-bom dan serangan darat Israel.

"Kami akan terus memastikan Israel aman dalam hal sistem keamanan Iron Dome dan kemampuan mereka untuk menanggapi serangan dari luar, dari wilayah Timur Tengah baru-baru ini," katanya.

"Tapi itu (invasi ke Rafah), itu salah. Kami tidak akan melakukannya - kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri," tegas Biden.

AS telah menghentikan pengiriman "amunisi muatan tinggi" karena kemungkinan operasi Israel di Rafah tanpa rencana untuk melindungi warga sipil, menurut Pentagon. Pemerintah mengatakan sedang meninjau potensi penjualan atau transfer amunisi lainnya.

Diketahui tak hanya AS, Israel juga mendapat pasokan senjata dari India. Laporan baru-baru ini mengungkap perusahaan pertahanan milik pemerintah India diduga mengirim amunisi dan peledak di Israel. Karena hal ini, New Delhi disebut terlibat dalam aksi genosida Israel terhadap rakyat Palestina.

Menurut laporan yang terbuka untuk publik, Munitions India Ltd (MIL), perusahaan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan India, memberikan izin untuk mengekspor produk mereka ke Israel mulai Januari 2024, seperti dilaporkan situs berita India, The Wire.

"Pada 18 April 2024, perusahaan tersebut kembali mengajukan ekspor produk yang sama berdasarkan pesanan ulang dari Israel. Persetujuan kedua ekspor perusahaan tersebut ke

Israel di bawah pertimbangan otoritas perizinan," jelas laporan tersebut, dikutip dari Press TV, Kamis (9/5).

Pemberian izin ekspor senjata oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi ini dilakukan di tengah genosida yang tengah berlangsung di Gaza. Muncul spekulasi bahwa senjata dari India ini mungkin digunakan dalam aksi genosida oleh pasukan penjajah Israel terhadap rakyat Palestina.

The Wire juga melaporkan, perusahaan swasta India bernama Premier Explosives Ltd. (PEL) telah mengekspor bahan peledak dan pelengkapannya ke Israel dengan izin dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri sejak 2021 dan diizinkan mengekspor bahan peledak ini dua kali sejak perang Israel di Gaza dimulai tahun lalu.

15 Ribu Anak Terbunuh

Lebih dari 15.000 anak terbunuh di Jalur Gaza sejak awal operasi militer Israel pada 7 Oktober 2023, demikian menurut pernyataan otoritas di daerah kantong Palestina itu.

"15.002 anak meninggal (di Jalur Gaza)... 17.000 anak hidup tanpa orang tua," tulis pernyataan yang dipublikasikan kantor pers otoritas Gaza pada Rabu (8/5/2024).

Di sisi lain, Militer Israel mengklaim serangan udara telah menewaskan komandan unit angkatan laut Hamas di Gaza City, Jalur Gaza. Tel Aviv menyebut komandan Hamas yang tewas itu telah melancarkan "serangan-serangan" terhadap tentara Israel dalam perang yang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir.

Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), militer Israel mengidentifikasi komandan angkatan laut Hamas yang tewas sebagai Mohammed Ahmed Ali.

Disebutkan militer Israel pada Rabu (8/5/2024) waktu setempat bahwa Ahmed Ali tewas dalam serangan udara "seharilalu".

Hamas belum memberikan komentar terkait klaim kematian salah satu komandannya.

Sejumlah sumber dalam kelompok Hamas menyebut Ahmed Ali sebagai anggota sayap bersenjata Brigade Ezzedine al-Qassam.

Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa "selama perang, Ali bertanggung jawab atas serangan-serangan di wilayah Israel dan terhadap pasukan darat (tentara Israel) yang beroperasi di Jalur Gaza" termasuk yang ada di Jalur Gaza bagian tengah selama seminggu terakhir.

Sayap bersenjata Hamas telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak perang meletus pada 7 Oktober tahun lalu, setelah serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel bagian selatan.(Afp, rtr, Al Arabiya, ist/ dya)



Saya telah menyatakan secara jelas bahwa jika mereka pergi ke Rafah, saya tidak akan lagi memasok senjata yang digunakan untuk menyerang,"

BEBERAPA SENJATA YANG DIPASOK AMERIKA KE ISRAEL



199 PESAWAT

(Termasuk pesawat tempur, pesawat angkut, dll)



137 HELIKOPTER

(Termasuk Helikopter Tempur, Helikopter Angkut)



31.642 RUDAL & MINI

(Bom kendali, rudal udara, misil dan peluncur roket)



1.085 TANK

(APC, APV, dan Artileri)



PRESIDEN AS, JOE BIDEN